

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDY EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU)

Sally Paulina Sandanafu

Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

Email: ssandanafu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern, kompetensi, kualitas laporan keuangan

1.1. PENDAHULUAN

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008), Wati dkk (2014), Sari dkk (2014) serta Fikri dkk (2015). Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Wati dkk (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sari dkk (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Demikian pula penelitian Fikri dkk (2015) menunjukkan bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian intern tidak mendukung kualitas laporan keuangan.

Suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudi dalam Fikri, 2015). Dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Herawati (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personal, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personal yang dilakukan kerap kali tidak mengikuti prinsip "*the right man on the right place*" (Fikri dkk, 2015). Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga (Wati dkk, 2014). Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu instansi merupakan aset yang berharga bagi instansi itu sendiri. Keberhasilan suatu instansi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika instansi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka (Humairoh, 2013).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Agency Theory

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya (Lane, 2000). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Petrie, 2002).

2.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Juwita (2013) meneliti implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menguraikan secara tuntas dan jelas mengenai karakteristik permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sari dkk (2014) meneliti pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

Hipotesis 1: Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku.

2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Herawati (2014) menyatakan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerja telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Fikri dkk, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

Hipotesis 2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku.

2.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan (Humairoh, 2013).

Hasil penelitian (Wati dkk, 2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

Hipotesis 3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Maluku.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian penelitian asosiatif kausal (sebab akibat) dengan pendekatan kuantitatif. Perumusan masalah dengan

penelitian asosiatif adalah menghubungkan dua variabel atau lebih. (Erlina, 2011). Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Tujuan penelitian asosiatif adalah melihat apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari sebab akibat atau dari variabel independen dan dependen penelitian. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2011).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada seluruh SKPD di Provinsi Maluku dengan jumlah 306. Alasan pemilihan populasi tersebut sebagai

lokasi penelitian karena perannya sebagai organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan senantiasa menjalankan tugas secara terpadu, berkala, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengendalian internal di masing-masing SKPD, sehingga kualitas hasil audit internal yang dilaksanakan oleh auditor dapat memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari laporan hasil pemeriksaan sebagai auditor eksternal.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana peneliti memilih anggota sampel untuk memenuhi suatu kriteria tertentu (Cooper dan Schindler, 2006). Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden yang terdiri dari 15 SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diantaranya:

**Tabel 3.1.
Jumlah Sampel SKPD**

No	Nama SKPD	Jumlah Sampel
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangann dan Aset Daerah	5 Orang
2	Dinas Pekerjaan Umum	5 Orang
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Orang
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Orang
5	RSUD dr. Haulussy	5 Orang
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Orang
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Orang
8	Dinas Perhubungan	5 Orang
9	Dinas Koperasi dan UMKM	5 Orang
10	Dinas Sosial	5 Orang
11	Badan Penanaman Modal Daerah	5 Orang
12	Inspektorat	5 Orang
13	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJB	5 Orang
14	Sekretariat DPRD	5 Orang
15	BAPEDDA	5 Orang
Total		75 Orang

3.3. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1. Variabel Independen Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan yang termuat dalam (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Fikri dkk, 2015).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri (Humairoh, 2013).

3.3.2. Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007) “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan". Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Teknik Analisa

Teknik pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *multiple regression analysis* (analisis regresi berganda). Persamaan model regresi yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

$$Y = +_1 X_1 + +_2 X_2 + +_3 X_3 + e \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- X₁ = Standar Akuntansi Pemerintah
- X₂ = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- X₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- = Konstanta
- ₁₋₃ = Koefisien regresi
- e = error

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 02 Agustus s/d 02 September 2016. Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan 75 kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu pegawai pengelola keuangan di setiap SKPD yang melakukan penyusunan laporan keuangan bertanggung jawab atas pengawasan internal. Kuesioner disebar dengan cara penyebaran yaitu diantarkan langsung ke responden mulai tanggal 04 Agustus 2016 dan diterima kembali mulai tanggal 29 Agustus 2016. Selanjutnya ringkasan mengenai pengiriman dan penerimaan kuisisioner dari responden sampel, dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rincian Pengiriman Dan Pengembalian
Kuesioner Penelitian

Total Pengiriman Kuisisioner	75
Kuisisioner yang kembali	65
Tingkat pengembalian (<i>response rate</i>)	86,66%
	34/39 * 100%

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel di atas menjelaskan bahwa, dari total kuesioner yang disebar dengan yaitu sebanyak 75 kuesioner yang kembali hanya sebanyak 65 kuesioner atau sebesar 86,66%. Sisa 10 kuesioner tidak

dikembalikan oleh responden sampai batas waktu yang telah ditentukan.

4.2. Profil Responden

Data penelitian menginformasikan bahwa dari total 65 orang responden, laki-laki berjumlah 38 orang atau sebesar 58,5% sedangkan perempuan berjumlah 27 orang atau sebesar 41,5%. Selanjutnya usia responden < 25 tahun sebanyak 5 orang atau 7,7% dan usia antara 25 - 35 tahun sebanyak 18 orang atau sebesar 27,8% dari total responden. Lebih lanjut, responden dengan usia antara 35 - 45 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 44,6% dan yang berusia diatas 45 tahun sebanyak 13 orang responden atau sebesar 19,9%. Lebih lanjut, pendidikan terakhir masing-masing responden adalah sebagai berikut; yang berlatar belakang pendidikan SMA sederajat sebanyak 7 orang responden atau sebesar 10,8% sedangkan yang berlatar belakang pendidikan DIII sebanyak 11 orang responden atau sebesar 14,7%. Disamping itu, responden dengan latar belakang pendidikan strata satu (S1) sebanyak 45 orang atau sebesar 69,2% dan sisanya 2 orang responden atau sebesar 5,3% berlatar belakang pendidikan strata dua (S2).

Penghasilan dari masing-masing responden menunjukkan responden dengan penghasilan dibawah 2,5 juta,2% adalah sebanyak 3 orang responden atau sebesar 4,6% sedangkan yang memiliki penghasilan antara 2,5 - 5 juta adalah sebanyak 40 orang responden atau sebesar 61,5%. Selanjutnya, responden dengan penghasilan antara 5 - 7,5 juta adalah sebanyak 17 orang responden atau sebesar 26,2 % dan sisanya sebanyak 5 orang responden atau sebesar 7,7% yang memiliki penghasilan di atas 7,5 juta. Tabel di atas juga menginformasikan bahwa, masa kerja responden atara 1 - 2 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 6,2% dan masa kerja antara 2 - 3 tahun sebanyak 10 orang responden atau sebesar 15,4%. Selanjutnya, masa kerja responden antara 4 - 4 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 20% dan sisanya sebanyak 38 orang responden yang bekerja diatas 4 tahun atau sebesar 58,4%.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan jawaban responden dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KTPF) menunjukkan nilai terendah sebesar 20 dan tertinggi pada nilai 35. Selanjutnya, nilai rata-rata sebesar 27,56 dan standar deviasi sebesar 4,44. Dari data dimaksud terlihat bahwa standar deviasi variabel kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KPTF) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud. Hal ini menunjukkan simpangan data dalam penelitian ini relatif kecil, yang berarti bahwa data kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KPTF) tergolong baik. Lebih lanjut, variabel partisipasi anggaran (PA) menunjukkan data terendah ada pada nilai 24 dan angka tertinggi pada nilai 40. Disamping itu, nilai rata-rata variabel sebesar 31,06 serta standar deviasi sebesar 4,96. Hasil ini

menunjukkan bahwa standar deviasi variabel partisipasi anggaran (PA) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud, yang berarti data variabel partisipasi anggaran (PA) baik.

Disamping itu, variabel komunikasi organisasi (KO) menunjukkan data terendah ada pada nilai 38 dan angka tertinggi pada nilai 70. Lebih lanjut, nilai rata-rata variabel sebesar 54,03 serta standar deviasi sebesar 7,52. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi variabel komunikasi organisasi (KO) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud, yang berarti data variabel komunikasi organisasi (KO) baik. Lebih lanjut, variabel kualitas sumberdaya manusia (KSDM) menunjukkan data terendah ada pada nilai 16 dan angka tertinggi pada nilai 35. Disamping itu, nilai rata-rata variabel sebesar 27,41 serta standar deviasi sebesar 4,38. Hasil ini menunjukkan bahwa standar deviasi variabel kualitas sumberdaya manusia (KSDM) lebih kecil dari nilai rata-rata variabel dimaksud, yang berarti data variabel kualitas sumberdaya manusia (KSDM) baik.

4.4. Uji Kualitas Data

4.4.1. Pengujian Validitas Data

Pengujian validitas dengan uji homogenitas data dan uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi yang positif dan tingkat signifikan pada level 0,00. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, partisipasi anggaran, komunikasi organisasi dan kualitas sumberdaya manusia adalah valid.

4.4.2. Pengujian Reliabilitas Data

Pada uji reliabilitas, konsistensi intern koefisien *cronbach's alpha* menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Dalam hal ini koefisien *cronbach's alpha* variabel kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebesar 0,93, koefisien *cronbach's alpha* variabel partisipasi anggaran sebesar 0,96 serta koefisien *cronbach's alpha* variabel komunikasi organisasi sebesar 0,96. Selanjutnya, koefisien *cronbach's alpha* variabel kualitas sumber daya manusia 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 12, tabel 13, tabel 14 dan tabel 15 bagian lampiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data untuk pengukuran nilai standar kualitas data baik validitas maupun reliabilitas adalah valid dan dapat dipakai dalam analisis selanjutnya.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Hasil Pengujian Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan K-S Model, dapat dijelaskan bahwa nilai *kolmogorof smirnov test* variabel kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD (KPTF) adalah sebesar 0,22 serta signifikan jauh di atas nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Lebih lanjut, *kolmogorof smirnov test* variabel partisipasi anggaran (PA) adalah sebesar 0,78 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Selanjutnya, *kolmogorof smirnov test* variabel komunikasi organisasi (KO) adalah sebesar 0,47 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Disamping itu, *kolmogorof smirnov test* variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) adalah sebesar 0,27 serta signifikan di atas nilai signifikansi 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas.

4.5.2. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan perhitungan, menjelaskan bahwa angka *tolerance* dari variabel independen variabel partisipasi anggaran (PA), komunikasi organisasi (KO) dan kualitas sumber daya manusia (KSDM) nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Disamping itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan hal yang sama, dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinearitas antar variabel independen. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.

4.5.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil perhitungan, pada grafik *scatterplot* tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

4.5.4. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Sajian *output* dari uji anova atau uji f model menunjukkan, nilai F-hitung adalah sebesar 12,78 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,000 (0%). Nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen partisipasi anggaran (PA), komunikasi organisasi (KO) dan kualitas sumber daya manusia (KSDM) terhadap variabel kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KPTF).

Berdasarkan usulan hipotesis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, maka hasil menunjukkan variabel partisipasi anggaran (PA)

berhubungan positif 0,29 dengan nilai probabilitas 0,03 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan partisipasi anggaran (PA) terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KTPF), sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis untuk variabel komunikasi organisasi (KO) berhubungan positif 0,02 dengan nilai probabilitas 0,80 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan komunikasi organisasi (KO) terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KTPF) sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak.

Variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) berhubungan positif 0,51 dengan nilai probabilitas 0,02 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia (KSDM) terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (KTPF), sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa, besarnya nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,52 atau sekitar 51,7%. Hal ini memberi arti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 51,7% sedangkan sisanya 48,3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.6. Pembahasan Hipotesis

4.6.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam Penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

Hipotesis yang diajukan adalah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Dari hasil uji t statistik menunjukkan variabel partisipasi anggaran berhubungan positif 0,30 dengan nilai probabilitas 0,03 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik partisipasi anggaran pada setiap SKPD, maka semakin baik pula kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Namun sebaliknya, jika semakin menurun partisipasi anggaran pada setiap SKPD maka berimplikasi kepada semakin menurunnya kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran (Brownell, 1982). Seperti yang dikemukakan Millani (1975), bahwa tingkat keikutsertaan dan pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipatif dan anggaran non partisipatif. Oleh karena itu, partisipasi penganggaran dalam penelitian ini sebagaimana ide Millani (1975), mencakup: keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, alasan yang diberikan oleh atasan ketika revisi anggaran dibuat, seberapa sering menyatakan permintaan pendapat dan atau usulan tentang anggaran ke atasan tanpa diminta, seberapa banyak pengaruh yang tercermin dalam anggaran akhir atau final, kontribusi terhadap anggaran, dan seberapa sering atasan meminta pendapat dan atau usulan ketika anggaran sedang disusun.

Dalam hubungannya dengan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang disusun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah tentang sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, unsur partisipasi anggaran yang melibatkan berbagai pihak ini sangat berpengaruh. Karena pada prinsipnya, LPPD tersebut disusun atas dasar pemenuhan target dari semua rancangan anggaran yang disusun sebelumnya. Jadi apabila terdapat partisipasi aktif dari semua unsur atas rancangan anggaran tersebut akan menyebabkan kinerja penyusunan LPPD tersebut akan semakin baik.

4.6.2. Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam Penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

Hipotesis yang diajukan adalah komunikasi organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Dari hasil uji t statistik menunjukkan variabel komunikasi organisasi berhubungan positif 0,18 dengan nilai probabilitas 0,80 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan komunikasi organisasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik atau semakin buruknya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku, tidak serta merta dipengaruhi secara

langsung oleh komunikasi yang dilakukan dalam organisasi.

Komunikasi organisasi pada dasarnya dilakukan pimpinan dan bawahan dalam rangka pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi perlu dikelola agar dapat memperkecil, bahkan menghilangkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Apabila komunikasi yang berlangsung dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, maka kesalahan pemahaman dalam organisasi tidak akan terjadi serta berdampak positif bagi pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja SKPD kearah yang lebih baik (Effendi, 1989 dalam Warisno, 2009). Konsep dimaksud akan terwujud, apabila di implementasikan dengan baik oleh setiap organisasi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian Warisno (2009). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara komunikasi organisasi dan kinerja SKPD. Selanjutnya penelitian lain yang kontra dengan hasil penelitian ini yaitu penelitian Juita (2003). Penelitian ini menguji pengaruh kualitas komunikasi organisasi terhadap kinerja SKPD. Metode pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah sampel 41 dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa komunikasi organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.

4.6.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam Penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

Hipotesis yang diajukan adalah Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Dari hasil uji t statistik menunjukkan variabel kualitas sumber daya manusia berhubungan positif 0,51 dengan nilai probabilitas 0,02 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwasemakin baik kualitas sumber daya aparatur pemerintahan pada setiap SKPD, maka semakin baik pula kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku. Namun sebaliknya, jika semakin menurun kualitas sumber daya para aparatur pemerintahan pada setiap SKPD tersebut, maka beimplikasi kepada semakin menurunnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan

tujuannya. Unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka melakukan kegiatan atau aktivitas atau rangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya tanpa unsur manusia, tidak mungkin organisasi dapat dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi peranan manusia adalah mutlak dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik (Mahmudi, 2007).

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wilfah (2010) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maswandi (2009). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah dari variabel kualitas sumber daya manusia dengan variabel kinerja. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya semakin tinggi pula tingkat kinerja organisasi publik. Selanjutnya, penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Juita (2003). Penelitian ini menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja SKPD. Metode pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah sampel 41 dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD.

5. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.
2. Komunikasi organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.
3. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyusunan LPPD Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta, Salemba Empat.
- Cooper, D.R., and Schindler. 2006. *Business Research Method*. Nine Edition. The McGraw-Hill.

- Erlina dan Sri Mulyani. 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press, Medan.
- Ghozali Iman H. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-Agent Models Go to Europe: Independent Regulatory Agencies as Ultimate Step of delegation. Paper Presented at The ECPR General Conference, Canterbury (UK)*.
- Hair, Joseph F, William C. Black, Barry J. Babin, and Ronald L. Tatham, 2006. *Multivariate Data Analysis*. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Hermawan. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Grasindo. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 2007. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jensen, M and Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm. Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Jogiyanto, H.M. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta
- Juwita. 2013. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- La Midjan, dan Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi 1*. Edisi Keenam. Lembaga Informasi Akuntansi.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mukhtar, Ramlah dan Noor Azman Ali. 2011. *Quality Governance of Human Aspects of Quality Initiatives in The Public Service Sector Current Issues of Business and Law*.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 1 Vol. 13. April 2008.
- Nurdiono. 2015. *Pengaruh Proporsi Anggaran dan Faktor Non Keuangan Pada Hasil Audit LKPD di Seluruh Indonesia*.
- Petrie, Murray. 2002. *A Framework for Public Sector Performance Contracting*. OECD Journal on Budgeting.
- Roviyantie, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Sari N, P, Y, M, M, Adiputra I, M, P dan Sujana E. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*, *Jurnal Akuntansi Progran SI*, Vol. 2, No. 1.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For business; A Skill Building Approach*. Fourth Edition, New York: John Wiley&Sons, Inc.
- Sevilla, Consuelo G. et. al. 2007. *Research Methods*. Rex Printing company. Quezon City.